



RENCANA KERJA [Renja] | Tahun 2024

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo**

Jl. Soekarno Hatta No 08

Daftar isi

Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I	
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Teori.....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan Rancangan Rencana Kerja	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	6
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	15
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	17
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ...	31
BAB III.....	32
TUJUAN DAN SASARAN	32
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	33
3.3. Program dan Kegiatan.....	34
BAB IV	37
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	37
BAB V.....	54
P E N U T U P.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Penyusunan RKPD dan Renja SKPD 2



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi dan Pencapaian Renstra	7
Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama	17
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan	17
Tabel 2.4 Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan..	22
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	35
Tabel 4.1 Matriks Renja	46



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dari Perangkat Daerah. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2020 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementrian/Lembaga, lintas Kementrian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonosobo dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program / kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai suatu dokumen resmi Rencana Kerja mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

- a. Merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 yang bertema “Penguatan Ekonomi,Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang berkelanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah “ untuk mencapai visi “Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing , Maju dan Sejahtera”.
- b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas yang berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD

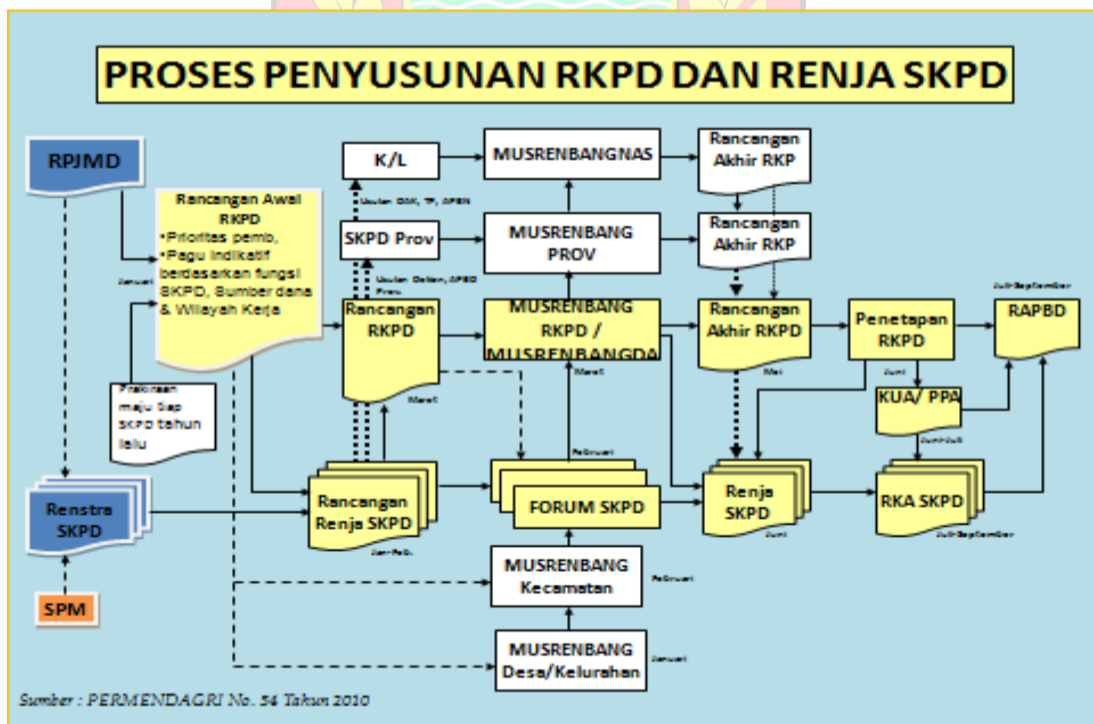
- c. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD
- d. Menjadi landasan penyusunan KUA PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD
- e. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja
- b. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja
- c. Penyusunan rancangan Rencana Kerja
- d. Pelaksanaan musrenbang Rencana Kerja
- e. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja
- f. Penetapan Rencana Kerja

Proses penyusunan RKPD dan Renja dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Proses Penyusunan RKPD dan Renja SKPD



1.2. Landasan Teori

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Nomor 5475);
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024
15. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024
Penetapan 12 Juli 2023
Pengundangan 13 Juli 2023
16. Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 29

1.3. Maksud Dan Tujuan Rancangan Rencana Kerja

1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 ini dimaksudkan agar Program dan Kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2025, serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 serta Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.

2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) Tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah dilakukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja OPD Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.3. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA

Bab. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

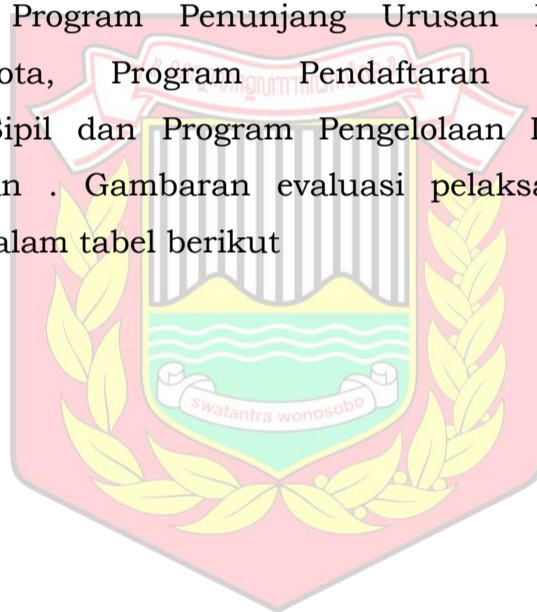
Bab. V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan program/kegiatan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui program/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan . Gambaran evaluasi pelaksanaan kegiatan dapat dituangkan dalam tabel berikut



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2021	target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan 2023	Realisasi capaian program/kegiatan/sub keg.s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra
					Target 2022	Realisasi Renja 2022	Tingkat Realisasi			
1	Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar									
	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1.	Program Pendaftaran Penduduk									
		1.Rasio kepemilikan KIA	48.01	34.49	42.95	41.76	97.23	48.01	45	93.73
		2.Rasio kepemilikan KTP el	100	99.81	100	98.72	98.72	100	98	98
	Kegiatan									
1.1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK		99.81	100	98.72	98.72	100	98	98
	sub.kegiatan									
	1.Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk			1. Draft KK 26.000 lbr	26,158	100.61	12 laporan	12 laporan	100
	2.pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan			1.Penyediaan jilid register Akte:100 buku	507	507	237 buku	237 buku	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2021	target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan 2023	Realisasi capaian program/kegiatan/sub keg.s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra
					Target 2022	Realisasi Renja 2022	Tingkat Realisasi			
1.2.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Rasio kepemilikan KIA	48	34.49	42.95		100	48.01	48	99.98
	sub.kegiatan									
1.2.1	1.Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk			1.Penyediaan bimtek operator 105 orang	1.Penyediaan bimtek operator 105 orang	100	1 laporan	1 laporan	100
2.	Program Pencatatan Sipil									
		1.Rasio kepemilikan akta kematian	48.49	35.56	44.56	91.7	205.79	48.49	48	98.99
		2.Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	70		65	100	153.85	70	70	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2021	target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan 2023	Realisasi capaian program/kegiatan/sub keg.s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra
					Target 2022	Realisasi Renja 2022	Tingkat Realisasi			
		3.Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	84	88.51	82	93.73	114.30	84	84	100
	Kegiatan									
2.1.	Pelayanan pencatatan sipil	1.Rasio kepemilikan akta kematian	48.49	35.56	44.56	91.7	205.79	48.49	48	98.99
		2.Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	70		65	100	153.85	70	70	100
		3.Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	84	88.51	82	93.73	114.30	84	84	100
	sub kegiatan									
2.1.1	1.Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan								
		Belanja jasa tenaga administrasi		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	13	13	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2021	target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan 2023	Realisasi capaian program/kegiatan/sub keg.s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra
					Target 2022	Realisasi Renja 2022	Tingkat Realisasi			
	Kegiatan									
3.1.	Pengumpulan data kependudukan,dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	100	100	100	100	100	100	100	100
	sub kegiatan									
3.1.1	1.Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	2	2	2 buku	2 buku	100	2	2 buku	100
3.1.2	2.Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	6	2	4	4	100	6	3	50

Mendasarkan pada data diatas, dari target indikator program RPJMD yang ditetapkan realisasi pada tahun 2022 seluruhnya sudah mencapai kategori sangat tinggi. Hal ini didukung adanya koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah pengampu urusan pada tingkat Kabupaten Wonosobo, Kecamatan maupun Pemerintah Desa.

Namun demikian, capaian beberapa indikator dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila dibandingkan dengan target dan capaian nasional pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA),

Secara nasional, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ditargetkan 40% ,sedangkan di Kabupaten Wonosobo ditargetkan 42,95% dan realisasi 41,76%. Dapat diketahui bahwa target di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional. Akan tetapi capaian di Kabupaten Wonosobo tahun 2022 sedikit dibawah target kabupaten, dan melampaui target secara nasional. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan KIA sebagai identitas bagi anak, selain itu masyarakat juga belum mengetahui manfaat nyata dari kepemilikan KIA. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan juga untuk menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat ,misalnya mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak swasta untuk mendapatkan prioritas pelayanan atau pemberian bonus bagi pemilik KIA . hal ini penting demi mensukseskan target kinerja sekaligus memberikan beragam manfaat bagi masyarakat

2) Rasio kepemilikan KTP

Secara nasional, cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik tahun 2022 ditargetkan 99,3% dan tercapai 99,44% ,melampaui target nasional sebesar 0,14%. Sedangkan di Kabupaten Wonosobo ditargetkan 100% dan tercapai 99,44%. Dapat diketahui bahwa target di Kabupaten Wonosobo lebih tinggi dibandingkan target secara nasional dan diharapkan pada tahun 2022 seluruh warga Kabupaten Wonosobo sudah melakukan perekaman KTP Elektronik. Akan tetapi capaian di Kabupaten Wonosobo masih belum mencapai target sepenuhnya . Hal ini dikarenakan Mobilitas penduduk yang tinggi dan banyaknya penduduk yang tinggal di luar domisili administrasi kependudukan. Upaya yang sudah dilakukan antara lain melakukan jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah dan wilayah di kabupaten Wonosobo.

3) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Secara nasional, cakupan akta kelahiran tahun 2022 ditargetkan 97% , Sedangkan di Kabupaten Wonosobo ditargetkan 82% dan tercapai 93,73%. Dapat diketahui bahwa target di Kabupaten Wonosobo lebih rendah

dibandingkan dengan target nasional. Capaian di Kabupaten Wonosobo telah melampaui target yang ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam tabel 2.2

Adapun indikator kinerja yang tertuang pada Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 2.2
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	Jumlah yang memiliki KTP berbasis Nik : Jumlah Wajib KTP x 100 %	Bidang Pelayanan
2.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran penduduk usia 0-18 tahun	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran : Jumlah penduduk usia 0-18 tahun x 100 %	Bidang Pelayanan
3.	Terpenuhinya Layanan penunjang untuk pertumbuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	

Kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo

No	Indikator	SPM / Standar Nasional *	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				n-2	n-1	n	n+1	n-2	n-1	Tahun n	n+1	
	Program Pendaftaran Penduduk											*target nasional 2023 disamakan 2024

1	Rasio kepemilikan KIA	50	41.76	42.95	48.01	53.07	58.13	41.76	48	53	58	
2	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK	99.4	99.44	100	100	100	100	98.72	98	100	100	
	Program Pencatatan Sipil											
1	Rasio kepemilikan akta kematian	100	91.70	44.58	48.89	53.19	57.49	91.7	48	53	57	secara nasional :1. target ketersediaan Buku Pokok Pemakaman di desa/kecamatan yaitu 75%.2.penerbitan akte kematian 100% dari laporan yang sesuai.
2	Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen		100	65	70	75	80	100	70	75	80	Definisi penduduk rentan adminduk berdasarkan Permenagri 96/2019
3	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	98	93.73	82	84	86	90	93.73	84	86	90	
	Program PIAK											
1	Persentase Peningkatan Jumlah lembaga/Perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	15 opd	100	6	10	15	20	100	10	15	20	
2	Persentase cakupan updating data kependudukan	100	100	40	53.33	66.67	80	100	100	66	80	Berdasarkan Pelayanan harian
3	Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi berbagai tantangan yang harus dihadapi dengan baik.

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

- Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia baik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil masih belum memadai;
- Sarana dan prasarana kantor yang kurang menunjang pelayanan ;
- Masih kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan peristiwa penting ke dalam suatu dokumen kependudukan;
- Kendala Jaringan dan geografis wilayah Kabupaten Wonosobo;
- Kebijakan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara terpusat, sehingga daerah tidak bisa mengolah data sendiri dan harus menunggu data turun dari pengelola data pemerintah pusat;
- Pencetakan KTP Elektronik terkendala ketersediaan blangko KTP yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat.;
- Pelayanan dokumen adminduk kepada penduduk rentan masih terkendala kurangnya data akurat terkait penduduk rentan;
- Perjanjian Kerjasama untuk pemanfaatan data kependudukan terkendala persyaratan Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001, karena belum ada OPD di Wonosobo yang memiliki sertifikat ISO 27001

b. Dampak

- Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah.
- Waktu penyelesaian pekerjaan masih membutuhkan waktu lama sehingga seringkali petugas harus lembur supaya pekerjaan bisa selesai.

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

- Memberikan Sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya Dokumen kependudukan kepada masyarakat;
- Memberikan sosialisasi kepada perangkat daerah lainnya untuk memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan
- Jemput Bola ke tempat-tempat tertentu seperti sekolah, pondok pesantren dan kantor ;
- Data akurat penduduk rentan ;

- Peningkatan Kapasitas SDM petugas Pelayanan
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Sarana Prasarana Aparatur
- Belum ada perangkat daerah yang memiliki sertifikat ISO 27001 sebagai syarat pengajuan Perjanjian Kerjasama dengan Disdukcapil ;
- Mencari inovasi baru dalam pelayanan.

d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut:

1. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat, maka mempengaruhi proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah daerah maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon;
2. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital;
3. Peningkatan kualitas data kependudukan dalam rangka persiapan pemilu serentak tahun 2024;
4. Perlunya Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Dari isu-isu penting tersebut diatas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi sebagai berikut :

- Selalu koordinasi dengan pusat terkait penerapan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dalam rangka implementasi layanan administrasi kependudukan digital dan teknis pengajuan Perjanjian Kerjasama yang mudah dan aman;
- Memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan;
- Mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah ;
- Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dalam rangka Gerakan Indonesia Sadar Adminduk melalui berbagai program jemput bola, layanan online dan inovasi layanan terintegrasi.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

- Hasil analisis kebutuhan tahun 2024 menunjukkan penambahan angka yang cukup besar terutama pada sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah. Hal ini disebabkan karena adanya pengadaan kendaraan dinas yang baru mengingat kondisi kendaraan dinas yang ada sudah beberapa kali mengalami kerusakan.
- Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sebagai berikut



Tabel 2.4
Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1.Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota				7.639.773.706	1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				8,882,617,405	
	1.1Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah					1.1Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				6,000,000	
	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wonosobo	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3		1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wonosobo	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3,000,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Wonosobo	Jumlah laporan evaluasi Kinerja	5		1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Wonosobo	Jumlah laporan evaluasi Kinerja	5	3,000,000	
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.311.117.405	
	1.1.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Wonosobo	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23		1.1.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Wonosobo	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23	4.311.117.405	
	1.3 Adminstrasi Umum Perangkat Daerah					1.3 Adminstrasi Umum Perangkat Daerah				734.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	1.1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Wonoso bo	jumlah Pket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10		1.1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Wonosobo	jumlah Pket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	3.000.000	
	1.1.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Wonoso bo	jumlahpaket peraltan dan perlengkapan kantor yg di sediakan	1		1.1.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Wonosobo	jumlahpaket peraltan dan perlengkapan kantor yg di sediakan	1	400.000.000	
	1.1.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Wonoso bo	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yg di sediakan	1		1.1.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Wonosobo	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yg di sediakan	1	50.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	1.1.4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Wonoso bo	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang di sediakan	1		1.1.4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Wonosobo	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang di sediakan	1	3.000.000	
	1.1.5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	wilayah Indonesia	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1		1.1.5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	wilayah Indonesia	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	275.000.000	
	1.1.6 dukungan Pelaksanaan SPBE	Wonoso bo	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE	1		1.1.6 dukungan Pelaksanaan SPBE	Wonosobo	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE	1	3.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	1.4 Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Wonosobo				1.4 Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Wonosobo			2.050.000.000	
	1.1.1 Pengadaan Peralatan mesin dan lainnya	Wonosobo	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			1.1.1 Pengadaan Peralatan mesin dan lainnya	Wonosobo			1,700,000,000	
	1.1.2 Pengadaan kendaraan dinas operasional	Wonosobo	jumlah unit kendaraan dinas yg di sediakan	1		1.1.2 Pengadaan kendaraan dinas operasional	Wonosobo	jumlah unit kendaraan dinas yg di sediakan	1	350.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	1.5 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					1.5 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				766.500.000	
	1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	Wonosobo	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5		1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	Wonosobo	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	6.500.000	
	1.1.2 penyediaan jasa komunikasi,SDA, dan Listrik	Wonosobo	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,SDA dan listrik yg di sediakan	12		1.1.2 penyediaan jasa komunikasi,SDA, dan Listrik	Wonosobo	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,SDA dan listrik yg di sediakan	12	125.000.000	
	1.1.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Wonosobo	jumlah laporam penyediaan jasa pelayanan umum yang di sediakan	12		1.1.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Wonosobo	jumlah laporam penyediaan jasa pelayanan umum yang di sediakan	12	635.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	1.6 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Wonosobo				1.6 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Wonosobo			1.015.000.000	
	1.6.1 penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Wonosobo	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20		1.1.1 penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Wonosobo	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20	70.000.000	
	1.6.2 pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Wonosobo	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yg di pelihara. di rehabilitasi	2		1.1.2 pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Wonosobo	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yg di pelihara. di rehabilitasi	2	900.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	1.6.3 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Wonosobo	jumlah sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara /di rehabiloitasi	2		1.1.3 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Wonosobo	jumlah sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/di rehabiloitasi	2	0	
	1.6.4 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		jumlah sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara /di rehabiloitasi	30		1.1.4 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		jumlah sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/di rehabiloitasi	30	45.000.000	
	2. Program pendaftaran penduduk				163.037.729	2. Program pendaftaran penduduk				1.775.000.000	
	2.1 Pelayanan Pendaftaran penduduk	Wonosobo				2.1 Pelayanan Pendaftaran penduduk	Wonosobo			1,650,000,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	2.1.1 peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Wonosobo	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk			2.1.1 peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Wonosobo	jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk		1,600,000,000	
	2.1.2 pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Wonosobo	Terlaksananya pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan			2.1.2 pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Wonosobo	jumlah laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan		50,000,000	
	2.2 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk					2.2 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk				125.000.000	
	2.1.1 bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Provinsi Jawa Tengah	jumlah laporan bimtek terkait pendaftaran penduduk	1		2.1.1 bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Provinsi Jawa Tengah	jumlah laporan bimtek terkait pendaftaran penduduk	1	125.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	3. Program pencatatan sipil				391.290.550	3. Program pencatatan sipil				400.000.000	
	3.1 Pelayanan pencatatan Sipil					3.1 Pelayanan pencatatan Sipil				150.000.000	
	3.1.1 pencatatan , penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Wonosobo	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting			3.1.1 pencatatan , penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Wonosobo	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting		75.000.000	
	3.1.2 pengadanan dokumen kependudukan selain blangko ktp el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Wonosobo				3.1.2 pengadanan dokumen kependudukan selain blangko ktp el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Wonosobo			25.000.000	
	3.1.3 peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Wonosobo	peningkatan cakupan kepemilikan akte pencatatan sipil	46		3.1.3 peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Wonosobo	peningkatan cakupan kepemilikan akte pencatatan sipil	46	50.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	3.2 penyelenggaraan pencatatan sipil	Wonosobo				3.2 penyelenggaraan pencatatan sipil	Wonosobo			250.000.000	
	3.1.1 fasilitasi terkait pencatatan sipil	Provinsi Jawa Tengah dan Jakarta	terfasilitasinya pencatatan sipil	12		3.1.1 fasilitasi terkait pencatatan sipil	Provinsi Jawa Tengah dan Jakarta	terfasilitasinya pencatatan sipil	12	100.000.000	
	3.1.2 sosialisasi terkait pencatatan sipil	Provinsi Jawa Tengah dan Jakarta	jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	1		3.1.2 sosialisasi terkait pencatatan sipil	Provinsi Jawa Tengah dan Jakarta	jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	1	150.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	4. Program pengelolaan informasi adminitrasai kependudukan				101.898.581	4. Program pengelolaan informasi adminitrasai kependudukan				240.000.000	
	4.1 pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan					4.1 pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan				170.000.000	
	4.1.1 pengolahan dan penyajian data kependudukan	Wonosobo	jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan			4.1.1 pengolahan dan penyajian data kependudukan	Wonosobo	jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan		75.000.000	
	4.1.2 Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Wonosobo	jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	3		4.1.2 Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Wonosobo	jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	3	25.000.000	
	4.1.3 inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Wonosobo	jumlah laporan hasil inventarisasi	1		4.1.3 inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Wonosobo	jumlah laporan hasil inventarisasi	1	70.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	5.1 penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan					5.1 penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan				70.000.000	
	5.1.1 fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Wonosobo	jumlah lapora hasil fasilitasi penbgelolaan informasi adminitrasi kependudukan	12		5.1.1 fasilitasi terkait pengelolaan informasi adminitrasi kependudukan	Wonosobo	jumlah lapora hasil fasilitasi penbgelolaan informasi adminitrasi kependudukan	12	70.000.000	
	JUMLAH				8.296.000.567					11.297.617.405	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo. Masyarakat bisa menyampaikan usulan melalui Survey Kepuasan Masyarakat .

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat Tahun 2024 Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Wonosobo	Gedung kantor pelayanan yang representatif	1 unit	-

Masyarakat menilai bahwa gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo kurang representatif, ruang tunggu dan tempat parkir kurang luas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan kondisi jumlah penduduk Indonesia yang besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana program nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk dapat dikelola dengan perencanaan yang baik.

Prioritas pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2020-2024 adalah secara kebijakan RPJMN 2020-2024, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada pada Prioritas Nomor 3 yaitu “Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing” dengan prioritas nasional pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan teknologi. Kebijakan pembangunan manusia secara umum diarahkan pada tiga strategi yaitu: (1) penguatan dan perluasan akses penduduk terhadap pelayanan dasar dan perlindungan sosial, (2) peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta (3) penguatan karakter dan kebudayaan.

Dari prioritas tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;

- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan;
- d. Peningkatan Kapasitas SDM ;
- e. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Sesuai arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian dalam Negeri maka fokus pelayanan Administrasi Kependudukan adalah pelayanan yang membahagiakan Masyarakat, yang dilaksanakan dengan perbaikan kualitas pelayanan melalui pelayanan secara daring, pelayanan yang cepat dan mudah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang selaras dengan Program Strategis Nasional, Program SKPD, RPJP Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2005 – 2025, RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021 – 2026 dan Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

B.1. Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

B.2. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

B.3. Target Indikator Kinerja Tahun 2024:

1. Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak : 53,07 %
2. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK : 100 %
3. Rasio kepemilikan akta kematian : 53,14 %
4. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam kepengurusan dokumen : 86 %
5. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran : 86 %
6. Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan : 15 %
7. Persentase cakupan updating data kependudukan : 66,67 %
8. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses : 100 %.
9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat : 83,5
10. Nilai SAKIP : 68.64

3.3. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program/kegiatan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui program/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan dilaksanakan dalam 12 (dua belas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Terdiri dari kegiatan:

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

1.1.2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.3.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.3.3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.3.4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

1.3.6. Dukungan pelaksanaan SPBE.

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah

1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.4.2. Pengadaan kendaraan dinas operasional.

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Penyediaan jasa surat menyurat

1.5.2. Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik

1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor.

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

1.6.2. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya

1.6.3. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan kantor

1.6.4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program pendaftaran Penduduk;

2.1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2.1.1. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk

2.1.2. Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan

2.2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk

2.2.1. Bimbingan Teknis terkait pendaftaran penduduk.

3. Program Pencatatan Sipil

3.1. Pelayanan Pencatatan Sipil

3.1.1. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting

3.1.2. Pengadaan dokumen kependudukan, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan.

3.1.3. Peningkatan pelayanan pencatatan sipil.

3.2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

3.2.1. Fasilitasi terkait pencatatan sipil

3.2.2. Sosialisasi terkait pencatatan sipil.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

4.1. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan

4.1.1. Pengolahan dan penyajian data kependudukan

4.1.2. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan

4.1.3. Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah.

4.2. Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

4.2.1. Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Kerangka pendanaan memuat seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja. Perangkat daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Rencana program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dijabarkan dalam enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan belas urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pemerintahan pilihan dan lima unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan non urusan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo memiliki program:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai indikator rata-rata indeks kepuasan masyarakat

2. Program Pendaftaran Penduduk;

Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio kepemilikan krtu identitas anak (usia 0-16 tahun) dan rasio kepemilikan KTP berbasis NIK.

3. Program Pencatatan Sipil;

Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan.



Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio kepemilikan akta kematian, persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen dan persentase anak yang memiliki akte kelahiran.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan, persentase cakupan updating data kependudukan, persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses.



Tabel 4.1
Matriks renja
Rencana Kerja (RENJA) Penyesuaian Disdukcapil Tahun 2024
Kabupaten Wonosobo

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan 2023	Anggaran Sub Kegiatan 2024	Indikator Sub Kegiatan			Pekerjaan Sub Kegiatan		
									Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	satuan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			8,987,617,405				5,737,946,872	7.759.419.823						
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		6,000,000	 APBD Wonosobo	Wonosobo	Jan-Des 2023	6,000,000	3,000,000						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1,500,000	 APBD Wonosobo	Wonosobo	Jan-Des 2023	3,000,000	1,500,000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	Dokumen	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan PD	3	kali
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000	APBD	Wonosobo	Jan-Des 2023	3,000,000	1,500,000	Jumlah laporan evaluasi kinerja	5	dokumen	Fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja PD	5	kali

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan 2023	Anggaran Sub Kegiatan 2024	Pekerjaan Sub Kegiatan			Pekerjaan Sub Kegiatan		
									Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	satuan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,311,117,405				3,771,146,872	4,502,919,823						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,311,117,405	APBD	Wonosobo	Jan-Des 2023	3,771,146,872	4,502,919,823	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23	orang/bulan	Fasilitasi Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	14	kali
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		839,000,000				713,700,000	509,100,000						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000	APBD	Wonosobo	Jan-Des 2023	3,000,000	3,000,000	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	Fasilitasi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10	kali

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan 2023	Anggaran Sub Kegiatan 2024	Indikator Sub Kegiatan			Pekerjaan Sub Kegiatan		
									Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	satuan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400,000,000	APBD	Wonoso	Jan-Des 2023	347,000,000	170,600,000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	paket	Fasilitasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	kali
		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000	APBD	Wonoso	Jan-Des 2023	82,700,000	80,000,000	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	paket	Fasilitasi Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	5	kali
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	3,000,000	APBD	Wonoso	Jan-Des 2023	3,000,000	3,000,000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	paket	Fasilitasi Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	12	kali
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330,000,000	APBD	Wonoso	Jan-Des 2023	275,000,000	249,500,000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	paket	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan
		Dukungan Pelaksanaan SPBE	3,000,000	APBD	Wonoso	Jan-Des 2023	3,000,000	3,000,000	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE	1	paket	Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan SPBE	3	kali

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan 2023	Anggaran Sub Kegiatan 2024	Indikator Sub Kegiatan			Pekerjaan Sub Kegiatan		
									Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	satuan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2,050,000,000				470,000,000	200,000,000						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	1,700,000,000	APBD	Wonosobo	Jan-Des 2023	470,000,000	200,000,000						
									Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	unit	Pengadaan alat rekam KTP mobile	4	unit
												Pengadaan laptop dan printer, scanner, PC	4	unit
												Pengadaan mesin ADM	1	paket
												Pengadaan peralatan dokumentasi kegiatan: handycam, drone, camera, cctv	1	paket

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan 2023	Anggaran Sub Kegiatan 2024	Indikator Sub Kegiatan			Pekerjaan Sub Kegiatan		
									Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	satuan
												Pengadaan server database	1	unit
		Pengadaan kendaraan dinas operasional	350,000,000	APBD	Wonoso bo	Jan-Des 2023		0	Jumlah unit kendaraan dinas yang disediakan	1	unit	Pengadaan kendaraan dinas roda empat	1	unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		766,500,000				667,100,000	729,400,000						
		Penyediaan jasa Surat menyurat	6,500,000	APBD	Wonoso bo	Jan-Des 2023	6,500,000	5,000,000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	laporan	Fasilitasi Penyediaan jasa Surat menyurat	12	kali
		Penyediaan Jasa Komunikasi ,SDA dan Listrik	125,000,000	APBD	Wonoso bo	Jan-Des 2023	125,000,000	125,000,000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,SDA dan Listrik yang disediakan	12	laporan	Fasilitasi Penyediaan Jasa Komunikasi ,SDA dan Listrik	12	kali

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan 2023	Anggaran Sub Kegiatan 2024	Indikator Sub Kegiatan			Pekerjaan Sub Kegiatan		
									Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	satuan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	635,000,000	APBD	Wonosobo	Jan-Des 2023	535,600,000	599,400,000	Jumlah laporan penyediaan jasapelayanan umum yang disediakan	12	laporan	Fasilitasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	kali
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,015,000,000				110,000,000	215,000,000						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	70,000,000	APBD	Wonosobo	Jan-Des 2023	70,000,000	70,000,000	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20	unit	Fasilitasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	20	unit

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan 2023	Anggaran Sub Kegiatan 2024	Indikator Sub Kegiatan			Pekerjaan Sub Kegiatan		
									Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	satuan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	900,000,000	APBD	Wonoso	Jan-Des 2023	40,000,000	100,000,000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit	Fasilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan Lainnya(Rehab berat gedung kantor)	2	unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	0	APBD	Wonoso	Jan-Des 2023	0	20,000,000	Jumlah sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit	Fasilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi sarpras Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	12	bulan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	45,000,000	APBD	Wonoso	Jan-Des 2023	0	25,000,000	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30	unit	Fasilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	30	unit

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan 2023	Anggaran Sub Kegiatan 2024	Indikator Sub Kegiatan			Pekerjaan Sub Kegiatan		
									Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	satuan
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			1,725,000,000				1,675,000,000	1,200,000,000						
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1,600,000,000				1,550,000,000	1,200,000,000						
		Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1,600,000,000	APBD	Wonosobo	Jan-Des 2023	1,500,000,000	1,200,000,000						
									Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk		laporan	Jemput bola pelayanan pendaftaran penduduk	12	bulan
												Belanja Jasa tenaga administrasi	13	kali
												Belanja Blanko KIA	10,000	keping

												Belanja formulir kependudukan	5	macam
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	---	-------

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan 2023	Anggaran Sub Kegiatan 2024	Indikator Sub Kegiatan			Pekerjaan Sub Kegiatan		
									Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	satuan
												Belanja alat bahan keg.kantor-bahan komputer : Ribbon ,Fargo, Film	fargo ribbon 100 buah. ribbon evolis 500 buah	unit
		Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan					50,000,000	0						
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		125,000,000				125,000,000	0						
		Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran penduduk	125,000,000	APB D	Provinsi Jawa Tengah/ DIY	Jan-Des 2023	125,000,000	0	Jumlah laporan bimtek terkait pendaftaran penduduk	1	laporan	Sosialisasi Pedoman Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	kali

PROGRAM PENCATATAN SIPIL															
			400,000,000				140,000,000	205,000,000							
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan 2023(penetapan)	Anggaran Sub Kegiatan 2023(rasionalisasi)	Indikator Sub Kegiatan			Pekerjaan Sub Kegiatan			
									Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	satuan	
	Pelayanan Pencatatan Sipil		150,000,000				75,000,000	130,000,000							
		Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	75,000,000					60,000,000					Pengelolaan Arsip Pencatatan Sipil		
													Jilid buku register	500	buku
													Fumigasi	1	kali

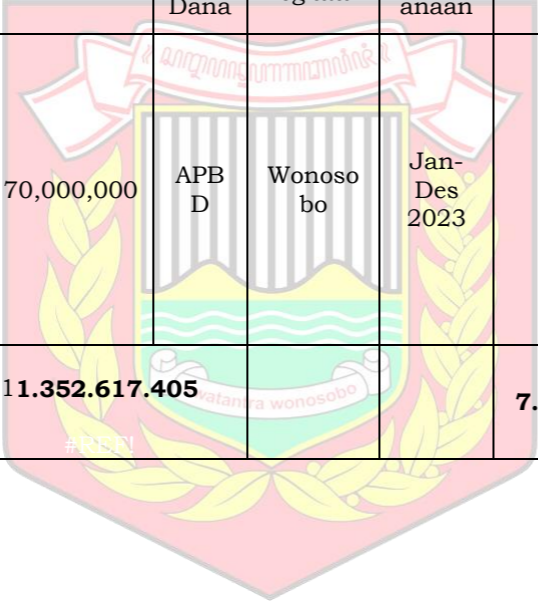
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan 2023	Anggaran Sub Kegiatan 2024	Indikator Sub Kegiatan			Pekerjaan Sub Kegiatan		
									Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	satuan
												Pemusnahan arsip	1	kali
		Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	25,000,000					20,000,000				Pengadaan formulir F.2-01	500	bendel
		Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	50,000,000	APB D	Wonoso	Jan-Des 2024	75,000,000	50,000,000	Peningkatan cakupan kepemilikan akte pencatatan sipil	46	layanan	Pelayanan dan pendataan penduduk rentan adminduk	46	layanan
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		250,000,000				65,000,000	75,000,000						
		Fasilitasi terkait pencatatan sipil	100,000,000					75,000,000	Terfasilitasinya pencatatan sipil	12	bulan	Fasilitasi sidang isbat dan pengakuan pengesahan anak	12	bulan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan 2023	Anggaran Sub Kegiatan 2024	Indikator Sub Kegiatan			Pekerjaan Sub Kegiatan		
									Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	satuan
		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	150,000,000	APB D	Provinsi Jawa Tengah /DIY	Jan-Des 2023	65,000,000	0	Jumlah laporan hasil sosialisasi sipencatatan sipil	1	kali	Sosialisasi regulasi pencatatan sipil	1	kali
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						0						
		Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil						0						
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			240,000,000				240,000,000	195,000,000						
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		170,000,000				170,000,000	125,000,000						
		Pengolahan dan penyajian data kependudukan	75,000,000	APB D	Wonoso	Jan-Des 2023	75,000,000	50,000,000						

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan 2023	Anggaran Sub Kegiatan 2024	Indikator Sub Kegiatan			Pekerjaan Sub Kegiatan		
									Tolak Ukur	target	Satuan	Tolak Ukur		target
									Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	1	dokumen	Penyusunan buku profil kependudukan	1	kali
									Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	1	dokumen	Galeri data Agregat Kependudukan	1	kali
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	25,000,000	APB D	Wonosobo	Jan-Des 2023	25,000,000	25,000,000	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	3	dokumen	Lounging Perjanjian Kerjasama dan Inovasi Pelayanan/aplikasi inovasi pelayanan	1	kali
		Inventarisasi Data untuk kepentingan pembangunan daerah	70,000,000	APB D	Wonosobo	Jan-Des 2023	70,000,000	50,000,000	Jumlah laporan hasil inventarisasi data	1	laporan	pemutakhiran data penduduk	1	kecamatan

	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		70,000,000				70,000,000	70,000,000					
--	---	--	-------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan 2023	Anggaran Sub Kegiatan 2024	Indikator Sub Kegiatan			Pekerjaan Sub Kegiatan		
									Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	satuan
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	70,000,000	APB D	Wonosobo	Jan-Des 2023	70,000,000	70,000,000	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12	laporan	Pemeliharaan jaringan kecamatan	16	OPD
JUMLAH			11.352.617.405				7.792.946.872	7.759.419.823						





BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan tahun ke 3 dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021 – 2026 . Dengan disusunnya RENJA ini diharapkan kedepan pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan perencanaan.

RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggungjawab bersama, terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya RENJA ini maka :

1. RENJA ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2024;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan terkait untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
3. RENJA ini akan menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2024;
4. RENJA ini akan dijadikan langkah awal perencanaan penyusunan RKA Tahun 2024.

Wonosobo, Februari 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

TARJO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001

